



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 900.1.3/Kpts.21-Ituk/Sek/TAHUN 2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan dalam ketentuan umum bahwa Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan huruf IX Lampiran Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, menyatakan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Bupati berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Nomor 900/175a-Perkeu/2023 tanggal 22 September 2023 Hal Usulan Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 September 2023

a.n. BUPATI CIAMIS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



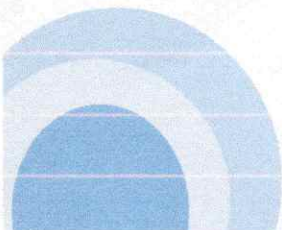
Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Sdr. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda.



**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	7
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	21
BAB III KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN	32
KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	32
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja).

Proses penyusunan Perubahan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dilakukan melalui kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, *review* hasil evaluasi pelaksanaan SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD penelaahan terhadap rancangan awal RKPD perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas penyajian awal dokumen rancangan renstra SKPD pembahasan dalam Forum SKPD dan penyusunan dokumen renja SKPD, Perubahan Renja SKPD dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta mengacu kepada rancangan awal RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1

- Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
 15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah
 16. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 050/Kpts.13-Huk/2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.
 17. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 050/Kpts.66-Huk/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun

- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu.
- c. memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024.
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja dan menentukan arah pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2024.

2. Tujuan

- a. meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- c. meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2022, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, dalam rangka mendukung upaya pencapaian dari Misi 5 “meningkatkan tata kelola yang efektif dan efisien” dan sasaran 1 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas” dari tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien”, Maka program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dapat disajikan pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda dan Pencapaian Renstra Setda s/d Tahun 2024
Kabupaten Ciamis

Kode	1	2	3	4	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH			Dari tabel 6	Dari tabel 9	Dilihat dari LAKIP 2022	8=(7/6)	9=(5+7+8) Dari tabel 4	10=(5+7+8)	11=(10/4)
4	01										
4	01										
4	01	01									
4	01	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	2 Dokumen	22%
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	2 Dokumen	22%
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	0%
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	0%

4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang	12 bulan	138 Orang	90,79%	152 Orang	6 bulan	50%
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	77 Sub Kegiatan	78 Sub Kegiatan	101,29%	12 Dokumen	65 Sub Kegiatan	84,4%
4	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 bulan	- 12 Bulan - 2 Jenis	100%	12 Dokumen	6 bulan	50%
4	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	1 dokumen	100%
4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	-	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
4	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	6 Laporan	50%
4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 laporan	12 bulan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													

4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	2 unit	4 unit	4 unit	100%	2 unit	3 unit	75%
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7 Jenis (PDH,PSH, PSL,PSR,K orpri,Batik, OR)	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-	-
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	152 PNS	152 ASN	138 Orang	90,78%	152 Dokumen	68 ASN	44,73%
4	01	01	2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 orang	4 Orang	16 Orang	400%	4 Orang	8 Orang	200%
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	1 kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%	450 Orang	1 Kegiatan	100%
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16 Item	10 Item	10 Item	100%	1 Paket	-	-
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	48 jenis	35 jenis	35 Jenis	100%	1 Paket	35 jenis	100%
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	104 Paket	104 Item	104 Item	107 Item	102,88%	18 Paket	20 Item	19,23%
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	12 Bulan	16 item	16 Item	100%	12 Paket	8 item	50%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	27 Item	23 Item	23 Item	100%	27 Paket	-	-
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Bulan	600 kunjungan	600 kunjungan	100%	12 Laporan	420 kunjungan	70%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	500 perjalanan	510 Perjalanan	10,2%	12 Laporan	265 perjalanan	53%

4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3 Jenis	4 Item	4 Item	100%	12 Dokumen	1 Item	25%
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Baru yang tersedia	2 Unit	unit	-	-	-	-	-	-
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Baru yang tersedia	10 Unit	unit	-	-	-	-	-	-
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	5 Jenis	8 set	1 Unit	100%	5 Unit	6 set	75%
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Unit	-	-
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7 Jenis	5 Item	5 Unit	100%	1 Unit	1 Item	20%
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Jenis	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3000 Surat	3029 Surat	3000 Surat	100,96%	3000 Laporan	590 surat	19,6%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	6 Bulan	50%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Paket	24 ruangan	- 24 Ruangan - 65 Orang	100%	12 Laporan	11 ruangan	45,83%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

4	01	01	2.09	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	16 Unit	21 Unit	100%	16 Unit	10 Unit	47,61%
4	01	01	2.09	02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	65 Unit	72 Unit	100%	65 Unit	35 Unit	48,61%
4	01	01	2.09	05	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	8 set	8 set	100%	8 Unit	8 set	100%
4	01	01	2.09	06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	145 Unit	2 item	100%	12 Unit	1 item	50%
4	01	01	2.09	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 gedung	3 gedung	100%	1 Unit	-	-
4	01	01	2.09	10	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5 item	8 item	100%	5 Unit	3 item	37,5%
4	01	01	2.09	11	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	173 unit	7 item	100%	173 Unit	3 item	42,85%
4	01	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
4	01	01	2.11	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	14 bulan	12 bulan	100%	2 Orang	6 bulan	50%
4	01	01	2.11	02	02	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	1 Paket	23 item	100%	1 Paket	21 item	91,3%
4	01	01	2.11	03	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	12 Bulan	48 kali	100%	5 Orang	34 kali	70,8%

4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	100%	1 dokumen	-	-
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keptokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keptokolan	12 Laporan	1 Dokumen	14 laporan	14 Kali	100%	12 laporan	5 laporan	35,7%
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	9 Paket advetorial, 30 Media Iklan, 1300 Kalender, 10.000 Tulisan Berita	12 laporan	0	0%	12 laporan	-	-
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	500 Dokumentasi, 500 Foto Presiden, 500 Foto Wapres, 1500 Kalender	46 laporan	- 28 Media - 52 Media - 1.538 Eksemplar - 1.560 Eksemplar	100%	12 laporan	36 laporan	78,2%
4	01	02												
4	01	02												
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan									
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 kec, 4 kegiatan, 4 kegiatan	10 dokumen	- 2 Kecamatan - 4 Kecamatan - 4 Kegiatan	100%	2 dokumen	7 dokumen	70%

4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	1 dokumen, 1 dokumen	2 dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
4	1	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	1 Dok, 1 dok, 1 dokumen, 12 kali	4 dokumen 12 kali	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Kali - 1 Dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen 6 kali	100% 50%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									
4	1	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	117 Dokumen	5 Kegiatan, 7 Kegiatan, 5 Kegiatan, 1500 Sasaran, 12 Kegiatan, 3 Kegiatan	34 kegiatan 2500 lembaga	- 5 Kegiatan - 37 Kegiatan - 1.584 Sasaran	100%	23 dokumen	24 kegiatan 285 lembaga	70,5% 11,4%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.	48 Dokumen	12 Bulan, 7 Kegiatan	27 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	12 dokumen	10 kegiatan	37,03%

4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	1 Kegiatan, 445 produk hukum	600 produk hukum	- 12 Tayangan - 370 Himpunan - 350 Lembaran - 7 Kegiatan - 942 Produk Hukum - 1300 Berita Daerah	100%	500 Dokumen	700 produk hukum	116,6%
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah									
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	5 Kegiatan	5 Dokumen	- 13 KSDD - 26 KSDPK	100%	10 Dokumen	2 Dokumen	40%
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	-	1 kerjasama	-	-	1 Dokumen	-	-
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	11 Laporan	5 Dokumen	11 laporan	- 5 KSDPK - 5 KSDD	90,90%	1 Laporan	2 laporan	18,18%
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	100 Berkas, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	101 Dokumen	- 100 Berkas - 1 Dokumen	100%	1 Dokumen	50 dokumen	49,50%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	-	-

4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1000 orang 200 orang	- 200 Orang - 1000 Orang	100%	1 Dokumen	-	-
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	26 Dokumen	23 Koordinasi	100%	1 Dokumen	21 Dokumen	80,76
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24 Dokumen	90 laporan	86 Koordinasi	100%	10 Laporan	41 laporan	45,55%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Dokumen	96 laporan	72 Koordinasi	100%	24 laporan	44 laporan	45,83%
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	700 Dokumen	700 Paket	896 Paket	100%	700 Dokumen	405 Paket	57,85%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	24 dokumen	12 Bulan	100%	12 Dokumen	12 dokumen	50%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	100 Peserta	265 Peserta	100%	100 Orang	100 Peserta	100%
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								

4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, Tahun Anggaran 2022 terdapat 3 Program, 20 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, diperoleh rata-rata capaian kinerja terhadap seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut selama Tahun Anggaran 2022 yaitu lebih dari 96.36% sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis berhasil dalam melaksanakan seluruh program/kegiatan selama 1 Tahun Anggaran.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 84.557.321.920,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 83.510.600.481,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,76 %.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis beserta capaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp. 40.140.909.700,00 dengan realisasi Rp. 39.598.234.214,00 dan capaian kinerja 98,65%. Program ini terdiri dari 12 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		40.140.909.700,00	39.598.234.214,00	542.675.486,00	98,65
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.242.200,00	170.217.500,00	24.700,00	99,99
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.285.100,00	78.271.500,00	13.600,00	99,98
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.257.600,00	17.249.500,00	8.100,00	99,95
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.899.500,00	17.896.500,00	3.000,00	99,98

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.608.670.503,00	18.280.021.943,00	328.648.560,00	98,23
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.395.118.703,00	18.066.617.043,00	328.501.660,00	98,21
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.784.500,00	61.646.625,00	137.875,00	99,78
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.416.500,00	100.412.000,00	4.500,00	100,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.500.000,00	27.495.525,00	4.475,00	99,98
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.850.800,00	23.850.750,00	50,00	100,00
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	833.529.324,00	816.756.351,00	16.772.973,00	97,99
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.255.000,00	39.243.125,00	11.875,00	99,97
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	794.274.324,00	777.513.226,00	16.761.098,00	97,89
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	453.477.850,00	430.033.500,00	23.444.350,00	94,83
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	39.805.000,00	34.801.000,00	5.004.000,00	87,43
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.275.000,00	190.275.000,00	-	100,00
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.795.850,00	65.593.400,00	15.202.450,00	81,18
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	115.000.000,00	114.000.000,00	1.000.000,00	99,13
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.602.000,00	25.364.100,00	2.237.900,00	91,89
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.196.767.850,00	6.185.827.256,00	10.940.594,00	99,82
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	146.776.600,00	146.365.830,00	410.770,00	99,72
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.355.600,00	202.598.281,00	757.319,00	99,63
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	722.113.000,00	714.863.916,00	7.249.084,00	99,00
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	689.605.000,00	689.590.000,00	15.000,00	100,00
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	236.505.650,00	236.215.300,00	290.350,00	99,88
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.289.218.000,00	3.287.675.000,00	1.543.000,00	99,95
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	829.619.000,00	829.493.929,00	125.071,00	99,98
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	79.575.000,00	79.025.000,00	550.000,00	99,31
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	737.763.000,00	731.505.270,00	6.257.730,00	99,15

27	Pengadaan Mebel	5.725.000,00	5.725.000,00	-	100,00
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.898.000,00	171.248.000,00	5.650.000,00	96,81
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	469.135.000,00	468.527.270,00	607.730,00	99,87
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.005.000,00	86.005.000,00	-	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.408.524.200,00	5.277.028.195,00	131.496.005,00	97,57
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.674.200,00	5.804.000,00	870.200,00	86,96
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	834.410.000,00	758.934.195,00	75.475.805,00	90,95
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.878.800.000,00	1.823.696.200,00	55.103.800,00	97,07
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.145.100.000,00	1.145.100.000,00	-	100,00
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.543.540.000,00	1.543.493.800,00	46.200,00	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.889.820.000,00	1.888.139.600,00	1.680.400,00	99,91
36	Pemeliharaan Mebel	75.600.000,00	75.600.000,00	-	100,00
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.850.000,00	87.850.000,00	-	100,00
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	647.854.000,00	647.343.000,00	511.000,00	99,92
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	718.416.000,00	717.646.600,00	769.400,00	99,89
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.100.000,00	359.700.000,00	400.000,00	99,89
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1.097.865.373,00	1.093.157.732,00	4.707.641,00	99,57
41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.125.373,00	771.269.028,00	856.345,00	99,89
42	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	185.740.000,00	181.930.110,00	3.809.890,00	97,95
43	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140.000.000,00	139.958.594,00	41.406,00	99,97
10	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.973.765.600,00	1.962.348.765,00	11.416.835,00	99,42
44	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	826.075.000,00	821.794.215,00	4.280.785,00	99,48
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	672.349.600,00	668.060.500,00	4.289.100,00	99,36

46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	475.341.000,00	472.494.050,00	2.846.950,00	99,40
11	Kegiatan Penataan Organisasi	1.306.555.200,00	1.300.171.544,00	6.383.656,00	99,51
47	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	266.080.600,00	263.520.503,00	2.560.097,00	99,04
48	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	381.683.000,00	380.598.000,00	1.085.000,00	99,72
49	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	389.719.400,00	389.207.792,00	511.608,00	99,87
50	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	182.390.000,00	180.532.949,00	1.857.051,00	98,98
51	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	86.682.200,00	86.312.300,00	369.900,00	99,57
12	Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1.463.928.600,00	1.463.026.558,00	902.042,00	99,94
52	Fasilitasi Keprotokolan	351.225.000,00	351.220.000,00	5.000,00	100,00
53	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	
54	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.112.703.600,00	1.111.806.558,00	897.042,00	99,92

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 sebesar Rp. 42.817.006.820,00 dengan realisasi Rp. 42.320.810.030,00 dan capaian kinerja 98,84%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		42.817.006.820,00	42.320.810.030,00	496.196.790,00	98,84
13	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	797.014.000,00	703.026.536,00	93.987.464,00	88,21
55	Penataan Administrasi Pemerintahan	296.250.000,00	275.918.700,00	20.331.300,00	93,14
56	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	289.529.000,00	226.922.500,00	62.606.500,00	78,38
57	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	211.235.000,00	200.185.336,00	11.049.664,00	94,77
14	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	38.031.802.820,00	37.679.106.525,00	352.696.295,00	99,07
58	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	37.364.541.820,00	37.015.115.525,00	349.426.295,00	99,06
59	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	267.999.000,00	265.805.250,00	2.193.750,00	99,18
60	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	399.262.000,00	398.185.750,00	1.076.250,00	99,73
15	Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	3.719.815.000,00	3.711.286.969,00	8.528.031,00	99,77
61	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	2.054.565.000,00	2.054.274.446,00	290.554,00	99,99

62	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.184.340.000,00	1.176.701.899,00	7.638.101,00	99,36
63	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	480.910.000,00	480.310.624,00	599.376,00	99,88
16	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	268.375.000,00	227.390.000,00	40.985.000,00	84,73
64	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	231.700.000,00	209.720.000,00	21.980.000,00	90,51
65	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2.680.000,00	2.680.000,00	-	100,00
66	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	33.995.000,00	14.990.000,00	19.005.000,00	44,09

c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Anggaran Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2022 sebesar Rp. 1.599.405.400,00,00 dengan realisasi Rp. 1.591.556.237,00 dan capaian kinerja 99,51%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.599.405.400,00	1.591.556.237,00	7.849.163,00	99,51
17	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	551.490.000,00	550.843.397,00	646.603,00	99,88
67	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	207.815.000,00	207.560.000,00	255.000,00	99,88
68	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	152.410.000,00	152.224.397,00	185.603,00	99,88
69	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	27.240.000,00	27.239.900,00	100,00	100,00
70	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	164.025.000,00	163.819.100,00	205.900,00	99,87
18	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	256.179.000,00	256.149.000,00	30.000,00	99,99
71	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	45.710.000,00	45.685.000,00	25.000,00	99,95
72	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	71.030.000,00	71.030.000,00	-	100,00
73	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	139.439.000,00	139.434.000,00	5.000,00	100,00
19	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	727.801.400,00	720.694.240,00	7.107.160,00	99,02
74	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	266.537.000,00	266.391.165,00	145.835,00	99,95
75	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	311.323.600,00	304.391.890,00	6.931.710,00	97,77
76	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	149.940.800,00	149.911.185,00	29.615,00	99,98
20	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	63.935.000,00	63.869.600,00	65.400,00	99,90
77	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	37.185.000,00	37.119.900,00	65.100,00	99,82

78	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	14.000.000,00	13.999.800,00	200,00	100,00
79	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12.750.000,00	12.749.900,00	100,00	100,00
JUMLAH TOTAL		84.557.321.920,00	83.510.600.481,00	1.046.721.439,00	98,76

Adapun capaian-capaian pelaksanaan Renja Tahun lalu (2022) dan capaian Renstra SKPD sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019-2023					2020-2024					2021-2025				
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tujuan																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	-	-	-	82,05	82,86	83,21	83,74	84,39	81,93	84,00	85,89	86,59	88,27	99,85%	101,620%	103,22%	103,40%	104,60%
	Sasaran																		
1	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Nilai LPPD	-	-	-	3,3366	3,4270	3	3	3	ST (3,3366)	T (3,4270)	Tdk ada penilaian k/m covid	5 (2,87)	n/a	100%	100%	-	95,67%	n/a
2	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	103,83%	100	100%	100%	100%	103,83%	100%
3	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	121,44%	100	100%	100%	100%	121,44%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	-	-	-	79	80	81	82	83	85,26	86,39	87,68	88,29	88,37	107,92%	107,99%	108,25%	107,67%	106,47%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	2,80	3,51	3,75	-	-	2,80	3,32	n/a	-	-	100%	94,59%	n/a
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	-	-	-	-	-	86,41	90,00	93,65	-	-	-	-	n/a	-	-	-	-	n/a
	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	93,22	96,67	98,880	-	-	93,22	80,47	n/a	-	-	100%	83,41	n/a
5	HE AKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	71	71	78	80	81	72,52	77,39	78,74	82,42	n/a	102,14%	109%	100,95%	103,03%	n/a
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP				9,9	9,9	9,92	9,95	10,39	n/a	9,89	9,96	10,45	n/a	n/a	99,90%	100,40%	105,03%	n/a
6	Level Maturlas SPIP Setda	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	2,85	3	n/a	100%	100%	95,00%	100%	n/a
7	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	-	-	-	700	725	750	775	800	724	809	812,74	786,42	n/a	101,85%	115,57%	108,37%	101,47%	n/a

A. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Isu-isu strategis yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai komponen pelaporan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peningkatan penerapan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur (proses bisnis) dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
3. Peningkatan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Peningkatan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
5. Peningkatan Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum .

B. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

Kondisi yang diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang ideal sesuai dengan isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi.
2. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur.
3. Peningkatan produktivitas, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
4. Keterbukaan informasi Publik.
5. Penerapan sistem informasi teknologi (*e-Government*).
6. Paradigma perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Situasi, kondisi ekonomi dan politik yang fluktuatif serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.
8. Kemitraan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam membangun daerah.

C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa perencanaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Ciamis Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari hasil Musrenbang Tahun 2023 sekaligus melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor.

Dengan demikian maka usulan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 diharapkan akan berdampak pada pencapaian Renstra Sekretariat Kabupaten Ciamis dalam menunjang pencapaian misi RPJM Kabupaten Ciamis.

BAB III

KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Telaahan terhadap kebijakan daerah merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah memantapkan pengembangan ekonomi secara luas dan menyeluruh dengan memperkuat sinergitas dengan desa yang di dukung dengan investasi yang terus tumbuh dan berkembang untuk mencapai keunggulan dan daya saing daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2019-2024 tersebut diatas, maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terkait langsung dengan pelaksanaan Misi ke 5 (Lima), yaitu : ***“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien “***.

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran RKPD Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Nilai	84,99
			1	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3
			2	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100%
	2	Meningkatkan Kualitas KebijakanPerekonomian danAdministrasi Pembangunan	1	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100%
			1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	84
			2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,01
	3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	100
			4	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	100
			1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	10,89
	4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data , pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	2	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	82
			1	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3
			1	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	800

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Ciamis Tahun 2024

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan	100%	55.105.827.195	
				2. Persentase Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		
				3. Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan public	100%		
				4. Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi			
				5. Persentase OPD dengan nilai IKM yang baik	100%		
				6. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	98,18%		
4	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	265.972.300	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	125.219.100	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23.958.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
4	01	01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	34.606.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan

4	01		01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	26.620.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01		01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	39.597.200	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01		01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.972.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01		01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan yang disusun	26 Dokumen	29.263.941.600	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01		01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/bulan	28.827.613.200	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01		01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	33.940.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01		01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	336.503.400	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01		01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	33.275.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan

4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	32.609.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD	24 Laporan	1.484.797.600	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	161.763.000,	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.323.034.600	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	5 Administrasi	455.468.200	Bagian Umum
4	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	18.634.000	Bagian Umum
4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	232.259.500	Bagian Umum
4	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	106.480.000	Bagian Umum
4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	26.620.000,	Bagian Umum
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	450 Orang	71.474.700	Bagian Umum
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dan kebutuhan administrasi umum yang difasilitasi	8 Kegiatan	7.239.118.600	Bagian Umum

4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	126.713.800	Bagian Umum
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	195.602.600,	Bagian Umum
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	104 Paket	1.523.560.600	Bagian Umum
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	676.813.500	Bagian Umum
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	223.699.600	Bagian Umum
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.647.889.600	Bagian Umum
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	734.365.900	Bagian Umum
4	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	110.473.000	
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis pengadaan BMD yang terfasilitasi	26 Jenis	2.468.507.200	Bagian Umum
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.210.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	605.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	63.787.700	Bagian Umum
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	208.967.000	Bagian Umum

4	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	326.773.800,	Bagian Umum
4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	53.978.700	Bagian Umum
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	4.084.309.800,	Bagian Umum
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.231.600	Bagian Umum
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.262.231.800	Bagian Umum
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.802.846.400	Bagian Umum
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	121 Unit	5.069.081.400	Bagian Umum
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	1.452.610.100	Bagian Umum
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	1.646.819.600	Bagian Umum
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	67.082.400	Bagian Umum
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	106.147.200	Bagian Umum
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	565.834.700	Bagian Umum

4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	724.561.200	Bagian Umum
4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	506.026.200	Bagian Umum
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah operasional kepala daerah dan wakil kepada daerah yang dibayarkan	12 Bulan	1.416.157.300	Bagian Umum
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.038.246.500	Bagian Umum
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	244.810.800	Bagian Umum
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	133.100.000	Bagian Umum
4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.553.603.000	Bagian Umum
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	753.352.600	Bagian Umum
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	563.984.600	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	236.265.800	
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi	Tingkat kematangan organisasi	Level Tinggi	820.808.200	Bagian Organisasi
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	31 Dokumen	221.770.400	Bagian Organisasi

4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25 Laporan	110.517.500	Bagian Organisasi
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	194.788.750	Bagian Organisasi
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	191.383.750	Bagian Organisasi
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	133.919.500	Bagian Organisasi
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Bulan	1.640.791.000	Bagian Prokopim
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	458.702.500	Bagian Prokopim
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	345.268.500	Bagian Prokopim
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	836.820.000	Bagian Prokopim
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti 2. Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti 3. Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100% 100% 100%	59.836.009.175	
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kegiatan tata pemerintahan yang terfasilitasi dan dilaksanakan	100%	897.418.200	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	151.731.500	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	491.586.700	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama

4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		2 Dokumen	254.100.000	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi dan dilaksanakan		100%	56.916.025.775	Bagian Kesra
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		23 Dokumen	56.528.788.675	Bagian Kesra
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyampaian informasi kebijakan bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketenagakerjaan dan transmigrasi		12 Dokumen	192.829.500	Bagian Kesra
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		9 Dokumen	194.407.600	Bagian Kesra
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron		100%	1.720.065.200	Bagian Hukum
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		500 Dokumen	362.795.000	Bagian Hukum
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		12 Kasus	1.051.327.800	Bagian Hukum
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		500 Dokumen	305.942.400	Bagian Hukum
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah		11 Dokumen	302.500.000	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama

4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	242.000.000	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	60.500.000	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan dan ditindaklanjuti 2. Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada Perangkat Daerah 3. Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	100% 100% 100%	2.077.960.900	
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah bahan rumusan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	509.425.000	Bagian Perekonomian dan SDA
						Jumlah bahan rumusan penyelesaian piutang macet	1 Dokumen		
						Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	1 Dokumen		
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	146.900.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	220.825.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	31.100.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	110.600.000	Bagian Perekonomian dan SDA

4	01	03	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Program Pembangunan	1 Dokumen	603.096.500	Bagian Adm Pembangunan
						Jumlah Dokumen hasil Pengendalian Pembangunan	10 Dokumen		
						Koordinasi dg Kab. Lain, Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan	24 Dokumen		
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	149.758.000	Bagian Adm Pembangunan
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan	223.438.500	Bagian Adm Pembangunan
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	24 Laporan	229.900.000	Bagian Adm Pembangunan
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang difasilitasi	100%	835.364.400	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	278.421.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	414.008.650	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	142.934.750	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan bidang SDA yang ditetapkan	3 Dokumen	130.075.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, dan perikanan	1 Dokumen	81.675.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan bidang lingkungan hidup	1 Dokumen	24.200.000	Bagian Perekonomian dan SDA

4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan bidang air	1 Dokumen	24.200.000	Bagian Perekonomian dan SDA
TOTAL								98.965.417.297	

BAB IV

PENUTUP

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 yang merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah serta dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

a.n. BUPATI CIAMIS,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



TATANG